



Pembangunan inklusif kelompok difabel melalui program pemberdayaan CSR PT PJB UP Muara Tawar

Maygsi Aldian Suwandi^{1*}, Widiyanto Dwi Ari Irawan², Rhima Rahmawati Fatimah³

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

^{2,3} CSR PT Pembangunan Jawa Bali Unit Pembangkit Muara Tawar, Indonesia.

Correspondance: maygsisuwandi@gmail.com

Recieve: 28 June 2022; Reviewed: 23 July 2022; Accepted: 30 July 2022

Abstract: Inclusive Development become one of development mainstream that been promoted by many actors whether government, private sector and CSO. It emerges from a problem that there still many vulnerable groups excuded from development including difable. In order to support inclusive development, CSR PT PJB UP Muara Tawar implemented pemberdayaan Inklusi Tangguh dan Mandiri (Mentari) Bekasi program. The target of the program is Anggrek Karya Cacat Berkreasi group. The research used qualitative descriptive method. Data collection done by literature study, observation dan interview with group leader, group member, CSR PT PJB UP Muara Tawar and related stakeholders. Concept used are inclusive development and CSR empowerment concept. In supporting inclusive development through difable empowerment, CSR PT PJB UP Muara Tawar raising awareness of potential difable, increasing capacity thoroughly in personal, intititutional and value system aspect and empowerment to ensure the sustainability and self reliance as a result of the program. Approach used is not only to create a progressive program but also gave positive impact for those related.

Keywords: Inclusive Development, CSR Empowerment, Difable

Abstrak: Pembangunan Inklusif menjadi salah satu mainstream pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh banyak pihak baik itu sektor pemerintah, swasta maupun CSO. Hal ini berangkat dari masih banyaknya kelompok yang tersisihkan dari pembangunan salah satunya adalah difabel. Dalam rangka mendukung pembangunan inklusif ini CSR PT PJB UP Muara Tawar melakukan program pemberdayaan Inklusi Tangguh dan Mandiri (Mentari) Bekasi. Kelompok yang dibina adalah kelompok Anggrek Karya Cacat Berkreasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi litreratur, observasi dan juga wawancara bersama ketua kelompok, anggota kelompok, CSR PT PJB UP Muara Tawar serta stakeholder terkait. Analisis data melalui 3 tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Konsep yang digunakan adalah konsep pembangunan inklusif dan pemberdayaan CSR. Dalam mewujudkan pembangunan inklusif melalui pemberdayaan difabel, CSR PT PJB UP Muara Tawar melakukan upaya penyadaran akan kondisi difabel yang memiliki potensi, peningkatan kapasitas secara menyeluruh baik secara personal, kelembagaan maupun sistem nilai yang ada serta pendayaan untuk menjamin keberlanjutan dan kemandirian dapat terwujud sebagai hasil akhir dari program. Pendekatan yang digunakan ini bukan hanya mewujudkan sebuah program yang mampu berjalan namun juga memberikan kebermanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Kata Kunci: Pembangunan Inklusif, Pemberdayaan CSR, Difabel

Copyright © 2022, Maygsi Aldian Suwandi,
Widiyanto Dwi Ari Irawan, Rhima Rahmawati
Fatimah

 10.30738/sosio.v8i2.12597



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Konsep Inklusi sosial merupakan sebuah pendekatan baru yang mengembangkan keterbukaan, mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang karakteristik, status, etnik, kemampuan, budaya, dan lainnya dalam proses pembangunan (Warsilah, 2015). Secara sederhana masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang dapat menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman diantaranya adalah keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi termasuk didalamnya kelompok disabilitas.

Blackhurst & Berdine mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang mengalami masalah fisik sehingga menyebabkan munculnya hambatan-hambatan dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya secara normal, dan oleh karenanya membutuhkan layanan serta program khusus (Sutatminingsih, 2002). Kekurangan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut membuat mereka memiliki keterbatasan untuk melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tanpa keterbatasan fisik. Perbedaan yang dimiliki ini secara empiris di lapangan menimbulkan masalah. Perbedaan membutuhkan adanya akomodasi khusus bagi mereka yang seringkali diabaikan sehingga penyandang disabilitas mengalami keterbatasan akses. Terkait perlindungan sosial yang belum optimal dan maksimal juga menjadi permasalahan karena belum masuknya difabel menjadi kelompok prioritas. Seolah belum cukup penyandang difabel juga mengalami stigma yang berujung pada diskriminasi (Demartoto, 2007).

Indonesia memiliki jumlah penyandang disabilitas yang tidak sedikit. Jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar ini membawa kerentanan salah satunya terkait angka pengangguran. Terdapat 21.930.529 penyandang disabilitas yang termasuk penduduk usia kerja, sebanyak 51,18 persen atau 11.224.673 orang termasuk angkatan kerja. Dari angka tersebut sebanyak 96,31 persen atau 10.810.451 orang termasuk angkatan kerja penyandang disabilitas yang bekerja sehingga pengangguran terbuka sebanyak 414.222 orang atau 3,69% (BPS Sakernas, 2017). Berdasarkan data tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menganggap bahwa perlunya penanganan kepada 3,69% penyandang disabilitas yang menjadi pengangguran terbuka tersebut. Untuk di Kabupaten Bekasi sendiri terdapat 959 penyandang difabel dengan berbagai jenis kecacatan (BPS: 2021).

Dalam instrumen kebijakan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang tersebut telah memayungi segala aspek terkait penyandang disabilitas. Upaya pemenuhan hak bukan hanya hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas dan kesejahteraan sosial, tetapi seluruh hak yang menyangkut hajat hidup manusia. Secara universal jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, Pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Pembangunan inklusif menjadi sebuah solusi yang banyak diupayakan saat ini. Pendekatan pluralisme kesejahteraan yang menjadi mainstream pembangunan saat ini menempatkan juga sektor di luar pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan. Salah satu aktor tersebut adalah sektor swasta. Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan inklusif salah satunya terwujud melalui kegiatan CSR yang dilakukannya. CSR menjadi suatu komitmen moral dimana perusahaan bukan hanya harus menyisakan sebagian keuntungannya melainkan juga mewujudkan rasa peduli dalam memfasilitasi kesejahteraan masyarakat disekitar agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, politik dan budaya (Suyatna et.al: 2015). Saat ini perusahaan tidak lagi semata hanya berfokus pada profit namun juga bagaimana kegiatan operasionalnya mampu memberikan benefit. Keterlibatan sektor swasta dirasa penting karena keterbatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan inklusif. Hal ini dikarenakan bisnis dapat menjangkau mereka yang luput dari perhatian pemerintah dan mereka memiliki dana tersendiri yang biasanya teralokasi pada program-programnya misalkan CSR (Susetiawan: 2012).

Terdapat beragam masalah yang dihadapi oleh difabel. Sebagaimana dalam Handayani (2019) menyebutkan bahwa salah satu masalah yang dialami difabel adalah ketidakmampuan untuk mengeksplorasi hal-hal unik dalam diri penyandang disabilitas tanpa perlu terpuruk dalam perasaan berbeda sebagai manusia yang "ditidakmampuan". Dalam penelitian Sholehah (2017) kepercayaan diri yang rendah menjadi salah satu masalah yang menghambat keberdayaan penyandang difabel. Sedangkan menurut Wijayanto (2015) mengungkapkan bahwa factor kelembagaan menjadi salah satu hambatan dalam upaya membangun

keberdayaan difabel. Dari beragam penelitian terdahulu dapat kita simpulkan bahwa program pemberdayaan ini sifatnya kompleks dan multidimensional. Bukan hanya sekedar permasalahan internal namun juga eksternal dari difabel itu sendiri. Dalam pemecahannya diperlukan pendekatan yang sifatnya holistic dan multisektoral

Salah satu program CSR yang berupaya mendorong sebuah pembangunan inklusif melalui pemberdayaan difabel dilakukan oleh PT PJB Muara Tawar. Kelompok yang disasar adalah Kelompok Anggrek Karya Cacat Berkreasi dimana anggotanya merupakan para penyandang difabel utamanya yang berada disekitar perusahaan. Kehadiran Program CSR ini bukan hanya sebagai bentuk menunaikan kewajiban namun juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka yang rentan baik secara materil maupun imateril. Tujuan penelitian ini untuk memahami tahapan yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan difabel oleh CSR PT PJB UP Muara Tawar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian berupa data deskriptif dari orang dan perilaku yang diamati baik berupa tulisan dan lisan (Moleong, 2014). Metode ini digunakan dengan tujuan agar dapat memahami faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan inklusif kelompok difabel melalui kegiatan CSR PT PJB Mura Tawar. Informan dalam penelitian ini merupakan anggota kelompok dari anggota Kelompok Anggrek karya cacat berkreasi. Pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan seperti pihak pemerintah daerah, mitra dan juga pihak CSR PT PJB Muara Tawar sebagai fasilitator dan penggagas kelompok Program Pemberdayaan Inklusi Tangguh dan Mandiri (Mentari) Bekasi. Informan dipilih secara purposif yakni mereka yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Anggrek karya cacat berkreasi.

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) ada empat tahapan yang ditempuh dalam menganalisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara yang dilakukan baik di kantor maupun mengunjungi rumah informan, mengikuti kegiatan kelompok baik rapat hingga pelatihan. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap-muka) maupun menggunakan media sosial *whatsapp*. Observasi dilakukan dengan terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh kelompok. Reduksi data dilakukan setelah melakukan wawancara dengan informan. Hasil wawancara disalin dalam bentuk tulisan dan informasi dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan atau mendiskripsikan secara jelas dan singkat mengenai data yang diperoleh pada saat wawancara untuk menemukan data jenuh yang dapat dijadikan sebagai acuan pembuatan kesimpulan. 3) Pengambilan kesimpulan sebagai tahap terakhir dimana kesimpulan yang dihasilkan merupakan sebuah proposisi yang perlu dikaji ulang berdasarkan data-data yang diperoleh sehingga diperoleh kesimpulan penelitian yang menggambarkan objek penelitian.

Pembangunan inklusif merupakan sebuah upaya untuk dapat mengurangi tingkat permasalahan multidimensional dan kompleks yang dihadapi masyarakat dimana dengan menciptakan peluang yang setara, saling memberi manfaat, serta pembangunan yang partisipatif. Pembangunan inklusif ini dibangun atas dasar penghormatan terhadap prinsip-prinsip dan nilai hak asasi manusia, non diskriminatif. Pembangunan inklusif ini merupakan model pembangunan alternatif yang muncul sebagai respon munculnya beragam dampak negatif dari implementasi kebijakan pembangunan saat ini yang dinilai terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi. Keberpihakan cenderung pada kelompok elit dengan meminggirkan kepentingan masyarakat lapis bawah, seperti kelompok miskin, marginal, dan kelompok minoritas. Dampak dari pembangunann yang sifatnya eksklusif ini diantaranya meningkatnya angka kemiskinan, merosotnya kualitas pembangunan manusia, serta makin melebarnya kesenjangan sosial (Prasetyantoko, 2012). Melalui definisi-definisi yang telah disebutkan maka pembangunan inklusif menjadi alternatif model pembangunan yang akan melindungi kelompok-kelompok yang terasingkan. Pembangunan inklusif ini dapat menjadi jalan keluar atas kegagalan yang terjadi melalui program dengan pendekatan eksklusif yang sebelumnya banyak di implementasikan. Pembangunan inklusif diharapkan mampu memberikan perubahan dimana hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap pihak tanpa terkecuali.

Pada dasarnya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, maksudnya adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan yang ditujukan kepada para *stakeholders*. Suatu perusahaan memiliki beberapa jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial (Solihin: 2015). Tanggung jawab perusahaan itu diwujudkan dalam kegiatan CSR. Dalam publikasi The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) berjudul "Making Good Business Sense" memberikan definisi CSR sebagai bentuk dari komitmen perusahaan untuk bertindak dilandasi etika, melakukan kegiatan operasionalnya secara legal serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup dari karyawan, keluarganya, komunitas lokal juga masyarakat secara luas dan dilakukan secara terus menerus (Wibisono, 2007). Saat ini tanggung jawab itu dipenuhi bukan hanya sebagai wujud kepedulian namun juga

merupakan bagian dari strategi untuk peningkatan keuntungan. Hal ini dikarenakan tuntutan pasar yang juga menginginkan menggunakan produk-produk perusahaan yang “baik”. Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang diimplementasikan perusahaan dalam perspektif pemberdayaan didisain berlandaskan pada “*the empowerment is road to participation*” (Nasdian, 2014). Dalam upaya pembangunan inklusif melalui pemberdayaan tentunya menerapkan prinsip partisipatoris. Hal ini guna mewujudkan sebuah program yang membangun kemandirian dan berkelanjutan. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 101), terdapat tiga tahapan dalam proses pemberdayaan, yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan.

Tahap penyadaran menjadi tahapan awal saat masyarakat mengetahui masalah sosial yang dihadapi dan mengetahui manfaat dari upaya penyelesaian masalah yang dilakukan. Kesadaran berkaitan dengan dimensi internal individu. Definisi lain terkait kesadaran adalah tahu dan mampu mengekspresikan dampak dari suatu perilaku dan berbagai alternatif penyelesaian serta dapat memahami pentingnya kooperasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu kesadaran pada sumber daya lokal tidak terbatas pada level pengetahuan melainkan sudah diaktualisasikan ke dalam tindakan pemanfaatan sumber daya lokal tersebut.

Peningkatan kapasitas adalah proses memampukan (*enabling*) atau pemberian pengetahuan serta keterampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Proses tersebut terbagi dalam tiga jenis, yaitu peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas organisasi, dan peningkatan kapasitas sistem nilai. Peningkatan kapasitas individu dilakukan dengan kegiatan seminar maupun pelatihan. Peningkatan kapasitas organisasi dilakukan dengan restrukturisasi agar pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Peningkatan kapasitas sistem nilai adalah sinkronisasi proses pemberdayaan dengan nilai-nilai yang telah mapan agar pemberdayaan dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Tahap pendayaan dilakukan dengan memberikan memberi kekuatan pada masyarakat agar dapat mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan memperluas jaringan tanpa bantuan pihak eksternal. Pada tahap ini kemandirian diharapkan telah tercipta dengan kemampuan yang telah diperolehnya serta dapat melangsungkan pemberdayaan yang berkelanjutan meskipun telah dilepas oleh pihak eksternal. Kemandirian disini mencakup tiga aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Pendayaan politik mencakup partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pendayaan ekonomi mencakup peningkatan pendapatan masyarakat dan akses terhadap pemanfaatan sumber daya. Pendayaan sosial mencakup solidaritas dan kepercayaan antar anggota masyarakat yang berproses bersama dalam program pemberdayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pembangunan Inklusif untuk Mewujudkan Keberdayaan yang Berkelanjutan

Pembangunan merupakan sebuah upaya perubahan terencana untuk mewujudkan perubahan kearah lebih baik. Perubahan positif ditujukan bagi semua tanpa terkecuali itulah yang dimaksudkan sebagai pembangunan inklusif. Namun sayangnya masih terdapat kelompok-kelompok yang tereksklusi dari pembangunan ini. Salah satunya adalah adalah kelompok difabel. Dalam kehidupan sehari-hari, para difabel telah mengalami kesulitan baik dari keterbatasan fisik, ketersediaan infrastruktur maupun sikap masyarakat. Masyarakat cenderung menganggap mereka sebagai kelompok yang tidak mampu, yang senantiasa harus dibantu bahkan dianggap tidak akan mampu hidup mandiri dan dianggap hanya menjadi beban. Stigma seperti ini semakin mempersulit kehidupan difabel. Sehingga dapat dikatakan permasalahan difabel ini bukan hanya bersifat personal seperti keengganan untuk maju namun juga permasalahan struktural yakni sistem tempat difabel tersebut tinggal.

Pada masyarakat inklusif diharapkan tidak hanya melihat difabel dari kekurangan yang mereka miliki tetapi juga melihat potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh para difabel. Masih banyak difabel yang mau berdaya dan mau berjuang dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Mereka ingin berusaha untuk dapat mandiri namun seringkali terhambat oleh lingkungan yang tidak mendukung. Mewujudkan masyarakat inklusif adalah sebuah upaya yang diperlukan dalam memberdayakan dan menyejahterakan para difabel. Dalam konteks pemberdayaan keberadaan pembangunan dan masyarakat yang inklusif menjadi faktor pendukung yang penting. Pemberdayaan mengarah pada upaya pemberian kapasitas dan kapabilitas sehingga subjek pemberdayaan dapat keluar kerentanan dan tumbuh kemandirian untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Kemandirian yang tercipta berkorelasi pada keberlanjutan kesejahteraan yang dicita-citakan.

“Program Pemberdayaan Inklusi Tangguh dan Mandiri (Mentari) Bekasi” CSR PT PJB Muara Tawar

PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) Unit Pembangkitan Muara Tawar adalah pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) dengan kapasitas terpasang 2050 MW, dan merupakan salah satu dari 6 pembangkit yang dioperasikan oleh PT. PJB di wilayah Indonesia. Dalam upaya memberikan komitmen dan tanggungjawab terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, maka pihak PT PJB menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di seluruh Unit Pembangkit (UP) dan Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (UBJOM). PT PJB memiliki 15 Area unit yang terdiri dari UP dan UBJOM yang melaksanakan program CSR khususnya untuk masyarakat di wilayah Ring 1 perusahaan. PT PJB UP Muara Tawar sebagai bagian dari PT PJB juga melaksanakan program CSR setiap tahun dengan memfokuskan pelaksanaan program CSR dalam bentuk *empowerment*, *capacity building*, *infrastructure* dan *chairity*. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab moral terhadap para pemangku kepentingan yang terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung, dari operasional perusahaan. Secara praktis tanggung jawab moral tersebut perusahaan hadirkan dalam berbagai program yang diwadahi dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang bersifat pro bono.

Perusahaan dalam operasionalnya memastikan keselarasan pengembangan usaha, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kompetensi masyarakat sekitar untuk menjamin peningkatan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan yang semakin baik merupakan salah satu fokus dan strategi perseroan. Hal tersebut sejalan dengan visi perusahaan, perseroan senantiasa mengupayakan keselarasan antara kinerja operasional dan pertumbuhan profit dengan tanggung jawab sosial, pengembangan lingkungan yang bersih dan sehat, serta kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020 di masa pandemi covid 19 pun program CSR terus dijalankan, hanya dengan pendekatan dan fokus program yang berbeda dengan sebelum pandemi. Beberapa program di awal pandemi lebih diarahkan kepada sisi kemanusiaan yaitu bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak covid 19 serta bantuan sarana prasarana kesehatan sebagai penerapan protokol kesehatan

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan, PT PJB memiliki tiga pilar yang menjadi rujukan dalam menyusun program CD yaitu; Bangkit inovasi pendidikan merupakan program keterampilan untuk menunjang ekspansi Bisnis. Bangkit inovasi ekonomi merupakan program pengembangan UKM yang dapat menunjang kebutuhan perusahaan. Bangkit inovasi lingkungan merupakan program peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasis lingkungan yang tematik, terintegrasi dengan pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Salah satu program CSR yang dilakukan oleh PT PJB Muaratawar adalah “Program Pemberdayaan Inklusi Tangguh dan Mandiri (Mentari) Bekasi”. Program ini menjadi salah satu program yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan inklusif. PT PJB UP Muara Tawar pada tahun 2020 bersama dengan Anggrek Karya Cacat Berkreasi turut serta berkontribusi dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok disabilitas di Kabupaten Bekasi. Anggrek Karya Cacat Berkreasi merupakan salah satu kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) yang didirikan untuk memberdayakan kelompok disabilitas. Anggrek Karya Cacat Berkreasi ini berfokus pada pembinaan kelompok disabilitas, anak jalanan, dan pengemis, agar mereka mampu berkarya. Anggrek KCB (Karya Cacat Berkreasi) didirikan oleh Ibu Supto Yuli Isminarti atau yang dikenal dengan Ibu Yuli. Awalnya kelompok ini menampung 3 orang penyandang cacat. Anggrek KCB membuka usaha di bidang "Hand Made" (Sulam, Lukis, Aplikasi, Manik-manik, dan lainlain). Seiring dengan perjalanan waktu, kelompok ini mengalami pasang surut dan menghadapi banyak tantangan.

Pendiri Anggrek Karya Cacat Berkreasi mempunyai misi untuk membantu teman-teman disabilitas lain agar mampu produktif layaknya masyarakat pada umumnya. Lokasi kegiatannya bertempat di lingkungan Panti Asuhan Darul Aytam Attaqwa Pusat, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Anggrek Karya Cacat Berkreasi memiliki bengkel atau rumah produksi sendiri dan melayani pembuatan berbagai macam produk konveksi, seperti jilbab, kaos, dan berbagai jenis pakaian lainnya yang dikerjakan langsung oleh penyandang disabilitas.

Seperti pada program-program lainnya, dalam program ini pun CSR PT PJB UP Muara Tawar menggunakan pendekatan pemberdayaan. Upaya pemberdayaan dilakukan dalam 3 tahap yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayaan. Upaya pemberdayaan ini untuk memastikan bahwa *outcome* yang diperoleh dari program adalah keberdayaan difabel yang mandiri dan berkelanjutan. Apabila yang muncul malah ketergantungan maka pemberdayaan dapat dikatakan gagal.

Menumbuhkan Kesadaran Kolektif bagi Upaya Pemberdayaan Difabel

Dalam upaya penumbuhan kesadaran ini dilakukan melalui sosialisasi dan sharing. Ketua kelompok yakni Ibu Yuli memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kesadaran ini. Sebagai difabel, Ibu Yuli

tidak ingin perbedaannya ini menghambat kehidupannya atau membuatnya menjadi “*less human*”. Beliau percaya bahwa ada selalu rahasia dalam setiap aspek kehidupan yang memerlukan waktu untuk memahaminya termasuk fakta bahwa beliau adalah difabel. Keengganan untuk bergantung pada orang lain ini yang mendorong beliau untuk meningkatkan keahlian yang dimilikinya salah satunya adalah menjahit. Seni selalu menarik minat beliau sedari belia. Kegiatan menjahit ini beliau lakukan karena tidak memerlukan banyak pergerakan kaki serta dapat dilakukan di rumah. Selain itu kegiatan menjahit tidak membutuhkan modal awal yang besar.

Seiring dengan berjalannya waktu Ibu Yuli menangkap peluang bisnis dari kegiatan menjahit yang dilakukannya. Pakaian merupakan kebutuhan primer dan tidak memiliki masa kadaluarsa sehingga Ibu Yuli yakin pada kegiatan usaha ini. Beliau menginginkan kelompok usaha bagi difabel. Hal ini juga merupakan hasil proses empatik beliau dengan merefleksikann dengan kondisi yang dialaminya. Sebagai seorang difabel bukan hanya aspek eksternal yang menghambat namun juga internal yakni diri sendiri. Rasa tidak percaya diri, merasa redah diri, merasa tidak mampu untuk berkembang adalah hal-hal yang menghambat diri seorang difabel untuk berkembang. Pemberian kegiatan ekonomi akan menjadi salah satu upaya yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini semakin diperkuat dengan kehadiran program CSR PT PJB Muara Tawar yang mendukung pada upaya pembangunan inklusif yang dalam hal ini adalah membantu membangun keberdayaan dari para difabel. Ibu Yuli menjadi *local hero* yang merupakan penggerak utama dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan dalam payung Program Pemberdayaan Inklusi Tangguh dan Mandiri (Mentari) Bekasi oleh CSR PT PJB Muara Tawar.

Bu Yuli senantiasa berupaya untuk membangkitkan semangat para difabel. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan Sosialisasi *door to door*. Bu Yuli dengan keterbatasan fisiknya dapat lebih berempatik dengan kondisi para penyandang difabel sehingga motivasi yang diberikan dapat lebih mudah diterima. Selain itu motivasi dari ini juga disertai dengan ajakan untuk bergabung dengan kelompok yang sudah memiliki kegiatan sehingga para difabel tertarik untuk terlibat dan menumbuhkan kepercayaan diri mereka.

“Awalnya memang sangat sulit untuk menumbuhkan kesadaran. Apalagi dengan stigma yang juga melekat bukan hanya dari orang sekitar namun dari diri difabel nya sendiri. Namun pendekatan personal dan kombinasi (pendekatan) informal dan formal bisa mulai menumbuhkan kesadaran.” (Wawancara CSR PT PJB UP Muara Tawar, Wawancara 23 April 2022)

Upaya lainnya dilakukan dengan kegiatan sharing keberhasilan dari program untuk meningkatkan kesejahteraan difabel sehingga semakin banyak yang berpartisipasi. Hal ini dilakukan secara formal melalui forum yang ada di masyarakat seperti pengajian ibu-ibu atau posyandu juga secara informal dari mulut ke mulut. Kemitraan dengan CSR PJB Muara Tawar juga menjadi salah satu daya tarik bagi difabel untuk terlibat dalam kelompok ini karena dukungan penuh yang diberikan. Selain itu Bu Yuli sebagai individu maupun bagian dari kelompok telah cukup sukses dan memiliki nama. Keberadaan beliau menjadi magnet tersendiri apalagi dengan kesamaan kondisi dimana beliau juga merupakan difabel.



Sumber : Dokumentasi Perusahaan

Gambar 1 Pelatihan Menjahit Bagi Difabel

Dalam pengelolaan kelompok juga dibangun sebuah budaya partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok. Meskipun Bu Yuli menjadi tokoh sentral namun beliau tetap mendorong pengambilan keputusan kelompok melalui forum dan bukan hanya diputuskan dirinya seorang. Sama halnya dengan kegiatan monitoring program yang dilaksanakan oleh CSR juga turut melibatkan seluruh anggota.

Peningkatan Kapasitas sebagai tangga menuju kesejahteraan secara mandiri

Kegiatan ekonomi utama dari kelompok Anggrek Karya Cacat Berkreasi bergerak di industri fashion. Industri ini sifatnya dinamis dan menuntut adanya kreatifitas dan adaptabilitas yang tinggi agar dapat mengoptimalkan peluang yang tersedia. Kemampuan menjahit menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki. Dalam memproduksi produk fashion diperlukan teknik yang berbeda pula. Untuk menunjang kegiatan kelompok ini maka CSR PT UP PJB Muara Tawar memberikan pelatihan teknik menjahit kaos, kemeja, celana serta gamis yang dilakukan terintegrasi dengan program CSR lain. Sinergi ini baik dilakukan selain untuk efisiensi juga bermanfaat untuk membangun jejaring diantara binaan perusahaan serta menciptakan ekosistem yang inklusif.

Selain dari aspek produksi, aspek lain yang perlu dikembangkan adalah terkait aspek pemasaran. Sebenarnya produk yang dihasilkan kelompok ini memiliki potensi pasar yang baik karena sisi pemberdayaan yang diberikan. Saat ini arah preferensi konsumen dalam memilih produk cenderung bergerak dari yang sekedar kegunaan menjadi nilai tambah dari produk yang digunakannya. Aspek ini berupaya dioptimalkan oleh perusahaan dengan memberikan pelatihan pemasaran khususnya pemasaran digital. Sekedar catatan hal ini bukan berarti perusahaan mendorong kelompok untuk menjual rasa kasihan dari orang lain. Aspek pemasaran digital disasar untuk mengikuti trend pasar yang cenderung lebih suka melakukan pembelian secara online. Selain itu hambatan mobilisasi yang dimiliki oleh difabel dapat diminimalisir dengan melakukan pemasaran secara online. Dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan ini perusahaan mencoba mencari *trainer* profesional yang juga merupakan difabel. Hal ini ditujukan sebagai upaya untuk memberikan pelatihan yang mampu menjawab tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh difabel secara lebih terarah. Selain ilmu terkait pemasaran digital, warga binaan juga dapat termotivasi untuk maju dan berdaya. Ini juga menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan ekosistem pemberdayaan yang inklusif secara holistik.



Sumber : Dokumentasi Perusahaan

Gambar 2 Pelatihan difabel yang dilakukan oleh trainer difabel

Pelatihan kelembagaan juga turut dilakukan untuk mendukung keberdayaan dari kelompok Anggrek Karya Cacat Berkreasi ini. Bentuk pelatihan yang diberikan adalah terkait dengan sistem manajemen organisasi termasuk pembukuan serta membangun SOP yang dapat diterima dan diterapkan oleh seluruh anggota kelompok. Keberadaan sistem dalam sebuah organisasi memiliki urgensi yang penting untuk memastikan keberfungsian dari kelompok tersebut. Terlebih kelompok ini bukan hanya sekedar sarana berkumpul namun juga menjelma menjadi kelompok dengan orientasi mencari keuntungan untuk pemberdayaan. Masalah keuangan apabila tidak dimitigasi secara baik bisa menjadi faktor pemicu perpecahan dari kelompok. SOP juga membantu difabel untuk bekerja secara disiplin untuk membentuk mentalitas yang siap terjun ke pasar yang lebih luas.

“Jadi semangat untuk berlatih dan berkembang karena trainernya saja bisa masa kami tidak apalagi ada dukungan dari banyak pihak” (Wawancara Anggota Kelompok, Wawancara 23 April 2022)

Dalam meningkatkan kapasitas sistem nilai, PJB menjadikan program ini sebagai salah satu program CSR unggulan perusahaan. Hal ini untuk membangun sebuah ekosistem inklusif bagi difabel. Sosialisasi dan promosi secara eksternal juga dilakukan untuk merubah stigma terhadap difabel yang ada. Difabel hanyalah mereka yang memiliki kemampuan yang berbeda dan bukan sebagai beban yang tidak memiliki kapasitas untuk berdaya. PJB turut mendorong keterlibatan kelompok dalam beberapa agenda yang bermitra dengan kementerian seperti Kementerian koperasi, Kemenppa, dan Kemenaker.

Pendayaan menuju difabel sejahtera

Program Pembinaan Kelompok Disabilitas dalam Usaha Konveksi di tahun 2020 merupakan bagian dari Program Kampung Batik Betawi (Babe). PT PJB UP Muara Tawar mengembangkan program dengan mengintegrasikan usaha konveksi dengan Batik Betawi melalui adanya pelatihan menjahit. Kelompok yang dibina adalah Nencle Handmade dan dibina langsung oleh Anggrek Karya Cacat Berkreasi (KCB). Anggrek Karya Cacat Berkreasi (KCB) mewadahi masyarakat dengan keterbatasan fisik agar dapat produktif. Selain itu juga turut memberi wadah bagi masyarakat luas, termasuk kelompok binaan PT PJB UP Muara Tawar yang lainnya sehingga tercipta inklusifitas program. Kegiatan yang dilakukan adalah membantu sarana dan prasarana produksi kelompok, serta memodifikasi infrastruktur kelompok menjadi ramah bagi penyandang disabilitas.



Sumber : Dokumentasi Perusahaan

Gambar 3 Program Pemberdayaan Difabel oleh CSR PT PJB UP Muara Tawar

Salah satu upaya pendayaan yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pelatihan meningkatkan dampak ekonomi bagi kelompok. Ketersediaan gedung yang ramah difabel dapat memberikan akses untuk pemberdayaan bagi penyandang cacat. Selain gedung bantuan yang diberikan juga berupa mesin jahit untuk kegiatan produksi. Setelah mendapat bantuan sarana dan prasarana pendukung ini, sasaran program yang merupakan warga dengan disabilitas dapat lebih banyak berlatih dan juga melatih keterampilan menjahit difabel. Kegiatan ini bukan hanya kegiatan untuk meningkatkan kepercayaan diri namun juga menjadi kegiatan untuk memperoleh pendapatan.

Para peserta / anggota yang awalnya tidak berpenghasilan dapat menjadi memiliki penghasilan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Adapun bagi peserta / anggota yang sebelumnya sudah memiliki penghasilan, dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan penghasilan mereka sebesar 30 - 40 %. Dengan adanya bantuan fasilitas yang diberikan PT PJB Muara Tawar, lokasi produksi menjadi semakin luas sehingga dapat turut mengurangi angka pengangguran. Sampai saat ini baru sebagian difabel yang menjadikan kegiatan menjahit di kelompok sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Dalam kegiatan usahanya kelompok menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan produk yang dihasilkan. Untuk kaos biasa yang waktu pengerjaannya relatif singkat, binaan dapat memperoleh Rp2000 – Rp3000 per pieces. Meskipun tidak secara rutin namun berdasarkan data yang dimiliki kelompok, pendapatan rata2 anggota perbulan bisa mencapai Rp2.000.000 – Rp5.000.000. Rata-rata satu kali pemesanan bisa mencapai 1000-5000 pieces yang dikerjakan 20 orang anggota. Banyaknya pesanan ini tak jarang membuat kewalahan anggota kelompok sehingga pada saat saat tertentu akan melibatkan tenaga bantuan dengan merekrut tenaga tambahan dari sekitar seperti saat pandemi covid.

Pandemi Covid tahun 2020 menjadi salah satu cobaan yang berat bagi kelompok usaha. Terjadi penurunan jumlah produksi dan omset Anggrek Karya Cacat Berkreasi mengalami penurunan. Minimnya pesanan serta turunnya omset membuat anggota kelompok disabilitas tersebut tidak memiliki pendapatan karena tidak adanya produksi. PT PJB UP Muara Tawar bersama dengan Anggrek Karya Cacat Berkreasi memberikan pendampingan dan pelatihan menjahit kepada kelompok disabilitas. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberi harapan agar kelompok disabilitas tetap bisa produktif di tengahwabah Covid-19 dengan memproduksi masker kain Selama pandemi Covid-19 berlangsung, peluang pasar penjualan masker kain sangat tinggi. Hingga bulan Juni 2020, Kelompok mampu menjual 25.000 Masker yang dapat dicuci dan digunakan Kembali. Hal ini juga didukung oleh gerakan menggunakan masker kain yang dikampanyekan pemerintah sehingga permintaan masker kain di pasar tentu akan semakin meningkat. Berdasarkan program tersebut, saat ini PT PJB UP Muara Tawar bersama dengan Anggrek Karya Cacat Berkreasi berhasil membina 20 warga penyandang disabilitas, 7 anak yatim piatu, dan 30 warga lainnya yang telah memberi manfaat kepada 3000 siswa di Yayasan Attaqwa.

“Sangat terdampak (saat covid). Ya pendapatan turun sedangkan kebutuhan bertambah seperti untuk masker, makanan yang sehat dll. Kerjasama dengan CSR (PT PJB UP Muara Tawar) membantu untuk memberi harapan lagi. Bukan Cuma buat kelompok tapi juga buat masyarakat sekitar Alhamdulillah.” (Wawancara Ketua Kelompok, Wawancara 23 April 2022)

Dalam memastikan upaya pendayaan dapat berjalan secara optimal, CSR bersama Kelompok Anggrek Karya Cacat Berkreasi (KCB) mencoba untuk memenuhi Supply bahan baku yang dibutuhkannya seperti kain maupun alat jahit diutamakan dari lingkup sekitar. Hal ini untuk menggerakkan roda perekonomian disekitar masyarakat. Selain itu pemenuhan kebutuhan dari lingkungan yang dekat dengan kegiatan kelompok akan memudahkan anggota kelompok yang difabel untuk mengakses bahan baku.

Langkah pendayaan lainnya adalah dengan menjadikan warga binaan sebagai pelatih untuk program pelatihan menjahit yang dilakukan PJB baik dalam satu program ataupun program lainnya. Hal ini untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri dari difabel. Ilmu yang dimiliki juga bukan untuk dikuasai sendiri namun juga dapat memberikan kebermanfaatn secara lebih luas. Terkait upaya ini bahkan ketua kelompok yaitu Bu yuli sudah jadi pemateri di salah satu program kartu prakerja oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia

Langkah lain dari PJB untuk membangkitkan keberdayaan dari kelompok adalah dengan menggunakan hasil produk kelompok untuk penggunaan perusahaan. Beberapa produk yang telah digunakan PT PJB antara lain adalah souvenir untuk PJB. Sebagai salah satu perusahaan besar tentu saja ada event dimana perusahaan memerlukan cinderamata untuk diberikan kepada kolega, mitra maupun pemerintahan. Penyediaan souvenir ini dipenuhi salah satunya hasil karya Kelompok Anggrek Karya Cacat Berkreasi (KCB). Selain itu upaya lainnya adalah penyediaan kaos untuk event yang rutin dilakukan setiap tahun seperti hari ulang tahun, gathering dan acara rutin lainnya serta seragam binaan dimana terdapat beberapa kelompok yang dibina oleh CSR PT PJB UP Muara Tawar. Selain kaos yang cenderung sederhana, perusahaan juga mendorong kelompok untuk dapat membuat wearpack untuk kebutuhan pakaian keselamatan yang terstandarisasi. Tentunya poin ini menjadi salah satu poin plus dari upaya pendayaan dari kelompok difabel binaan perusahaan.

PT PJB UP Muara Tawar berinovasi dengan mendorong terciptanya sebuah safety net dari kelompok. Safety Net ini bermanfaat saat terjadi kejadian-kejadian yang tak diharapkan seperti sakit ataupun kematian. Safety Net yang dimaksud disini adalah dengan menciptakan sistem dana sosial kelompok. Dana sosial kelompok ini selain dipergunakan untuk membantu anggota yang kesulitan juga digunakan untuk mengikutsertakan anggota sebagai anggota BPJS Kesehatan. Sistem yang diberlakukan adalah dengan memotong sedikit upah untuk dialihkan ke asuransi dan juga dana sosial untuk mengatasi kerentanan yang dialami.

PEMBAHASAN

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan (Hikmat, 2006). Pendekatan ini menjadi alternative dari upaya penyelesaian masalah social yang seringkali malah menimbulkan masalah sosial baru baik dalam proses maupun hasil akhirnya. Pemberdayaan sendiri bukan hanya dimaksudkan untuk sekedar memberi bantuan kepada masyarakat namun lebih jauh harus berisi upaya-upaua untuk memberdayakan mereka (kelompok rentan) agar mereka memiliki akses pada sumber-sumber ekonomi sekaligus politik (Usman, 2006). Dari sini pemberdayaan yang dimaksudkan buan hanya hal-hal yang bersifat ekonomis namun lebih jauh lagi mencakup keseluruhan aspek kehidupan dari masyarakat atau dalam hal ini adalah kelompok rentan. Hal ini dilakukan karena pemberdayaan ini menysasar upaya-upaya untuk membangun kemandirian dan keberlanjutan. Dalam pemeberdayaan kelompok difabel ini sumberdaya yang dioptimalkan bukan hanya sumberdaya ekonomi seperti modal dan keterampilan namun juga sumber daya sosial seperti solidaritas sosial dan juga politik seperti bagaimana anggota terbangun kemandiriannya untuk dapat bersuara dan juga memberikan pandangannya yang implikasinya bukan hanya pada kegiatan berkelompok namun juga pada kepercayaan dirinya sebagai individu didalam masyarakat.

Dalam upaya pemberdayaan lebih diarahkan pada pendekatan kelompok dibandingkan pendekatan individu. Pendekatan kelompok ini dirasa menjadi pendekatan yang mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Suparjan & Suyatno, 2003). Selain dianggap lebih efektif, pendekatan kelompok juga cocok dengan karakter masyarakat Indonesia yang cenderung komunal. Pendekatan ini turut mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam diri komunitas masyarakat. Dalam kelompok ini juga akan terbangun iklim saling menolong yang baik dan dapat menjadi motivator sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial yang dimiliki oleh kelompok difabel. Menghadapi kondisi yang dihadapi oleh kelompok difabel pendekatan kelompok ini semakin penting

untung dilakukan. Hal ini dikarenakan mereka adalah kelompok yang sering kali dieksklusikan oleh masyarakat secara luas. Rasa solidaritas akan kesamaan kondisi yang dihadapi bisa menjadi energy yang mendorong pemberdayaan. Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kelompok ini justru menciptakan eksklusifitas lain dalam kegiatan kelompoknya misalnya dengan mendirikan kubu-kubu dalam kelompok. Hal ini berdampak pada rendahnya minat dari kelompok yang tereksklusikan padahal tujuan dari pemberdayaan adalah kesejahteraan melalui kerjasama setiap lapisan (Putra, Wisadirana, & Mochtar, 2016)

Dalam pemberdayaan terhadap 3 tahapan yang dilakukan yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayaan. Penyadaran merupakan tahapan awal dan menjadi penentu dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan. Penyadaran menjadi pintu gerbang bagi subjek untuk melangkah dalam kegiatan pemberdayaan sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Kesadaran yang dimaksud disini merupakan kesadaran kolektif yang muncul dari individu-individu yang terlibat dalam pemberdayaan tanpa adanya paksaan. Tahap ini terutama menekankan pada upaya penggalan potensi dan bagaimana potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama. Drost (1993) berpendapat manusia yang berusaha untuk mencapai kemandirian harus mengetahui keunggulan maupun kelemahannya dan menerima keunggulan maupun kelemahan yang dimiliki. Potensi yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan baik yang sifatnya eksternal maupun internal. Sebagaimana yang banyak kita temui dilapangan, ketidakberdayaan diri seorang difabel disebabkan oleh faktor eksternal dan juga internal. Mereka merasa bahwa diri mereka tidak mampu dan hanya bisa bergantung. Padahal hal tersebut tidak benar. Banyak difabel yang terbukti berhasil maju dan bangkit melawan keterbatasannya bahkan sukses melebihi mereka yang disebut “normal”. Upaya penyadaran dilakukan oleh ketua kelompok dan CSR sebagai bagian dari upaya pemberdayaan yang sesungguhnya bukan sekedar program papan nama. Hal ini menumbuhkan kesadaran akan kemampuan diri serta menumbuhkan rasa kepemilikan bersama dari Program Pemberdayaan Inklusi Tangguh dan Mandiri (Mentari) Bekasi. Pola partisipasi seperti ini juga memastikan bahwa dinamika kelompok tidak stagnan karena masukan-masukan yang diterima dari anggota kelompok sehingga sifatnya dapat berkelanjutan.

Untuk mewujudkan sebuah keberdayaan, kapasitas menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian. Kapasitas yang dimaksud disini bukan hanya kapasitas individu namun termasuk didalamnya kapasitas organisasi maupun sistem nilai. Peningkatan kapasitas ini akan menjadi roda penggerak dari keberdayaan yang mendorong pada kemandirian. Tanpa adanya upaya peningkatan kapasitas pemberdayaan tidak akan terjadi bahkan bisa saja malah menimbulkan ketergantungan. Apabila demikian perusahaan yang juga akan menanggung akibatnya karena tuntutan yang terus bermunculan yang bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik industrial. Dalam pelaksanaan kegiatan CSRnya, PT PJB UP Muara Tawar turut mengupayakan adanya peningkatan kapasitas secara menyeluruh dari binaan maupun ekosistem yang mendukungnya. Seringkali difabel ini, dikarenakan stigma yang sudah terlalu lama terbentuk dan mengakar, menjadi individu yang tidak siap masuk pasar kerja karena mengglorifikasikan ketidakberdayaan yang sebenarnya hanya sebuah konstruksi sosial namun terlanjur diyakini dan menjadi sebuah kebiasaan.

Upaya pemberdayaan sesungguhnya bukan hanya menasar pada penyelesaian masalah dari permukaan semata namun juga menasar hingga ke akar masalah. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah kemandirian dimana terjadi perubahan kondisi dari ke arah yang lebih baik. Kemandirian yang tercipta juga diharapkan dapat bersifat berkelanjutan sehingga intervensi yang diberikan perusahaan dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Tahapan pendayaan menjadi tahapan akhir dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh CSR PT PJB UP Muara Tawar kepada kelompok binaannya. Selain itu keuntungan lain dari pemanfaatan sumber daya lokal adalah terpeliharanya modal sosial yang ada sehingga kebermanfaatannya dari hadirnya kelompok ini bukan hanya dirasakan oleh mereka yang berinteraksi secara langsung namun juga mereka yang tidak terlibat langsung didalamnya. Hal ini tentunya menjadi dapat menjadi pendorong semangat keberdayaan dari difabel dimana dari sini bisa dilihat bahwa kondisi difabel tidak membuat diri mereka tidak lebih berharga dibanding dengan mereka yang “normal”. Kepercayaan diri yang terbangun juga menjadikan kelompok ini bahkan dapat menjadi *middle man* dari produk UMKM dilingkungannya karena terbangunnya jejaring yang luas dari kelompok. Sebelum membantu pemasaran kelompok melakukan repackaging dari produk UMKM yang ada agar kemasannya lebih menarik dan lebih menjual dalam hal ini adalah produk keripik pisang.

Dalam memberdayakan masyarakat aspek yang diperhatikan bukan hanya terkait mengatasi masalah yang sedang dihadapi namun juga terkait upaya-upaya untuk memitigasi resiko yang mungkin terjadi kedepannya. Hal ini menjadi semakin penting karena kondisi difabel sendiri yang merupakan kelompok rentan. Meskipun hal yang perlu dicatat adalah bahwa dalam pemberdayaan sesungguhnya tidak ada model “satu untuk semua” namun untuk melakukan design ulang model yang sesuai dengan konteks yang juga berbeda dalam masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut (Jakimow, 2018).

KESIMPULAN

PT PJB UP Muara Tawar Melalui Program Pemberdayaan Inklusi Tangguh dan Mandiri (Mentari) Bekasi berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan difabel melalui kegiatan Kelompok Anggrek Karya Cacat Berkreasi (KCB). Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan langkah penyadaran bekerjasama dengan local hero yang juga seorang difabel. Setelah itu peningkatan kapasitas dilakukan secara menyeluruh baik secara personal dengan pelatihan, kelembagaan dengan pembentukan SOP maupun sistem nilai yang ada dengan melakukan kampanye maupun kegiatan yang mengubah stigma terkait difabel di masyarakat. Terakhir adalah dengan melakukan tahapan pendayaan yang dilakukan dengan pemanfaatan produk hasil kelompok secara internal, membangun kepercayaan diri kelompok dalam berjejaring, mendukung sarana dan prasarana serta mendorong kegiatan yang sifatnya ekonomis. Program CSR telah melakukan tahapan pemberdayaan yang cukup baik. Hal ini dilakukan bukan hanya dengan orientasi pada program namun juga penerima manfaat. Upaya pemberdayaan harus mampu membangun kemandirian yang dilandasi kesadaran tersebut. Langkah pemberdayaan ini bukanlah yang terbaik namun dapat menjadi sebuah pembelajaran dalam mengatasi dinamika pembangunan inklusif melalui pemberdayaan difabel karena untuk menciptakannya semua orang harus mendapatkan akses dan berhak untuk sejahtera.

Penelitian ini tentunya tidaklah sempurna. Terdapat kekurangan yang dapat dilengkapi pada penelitian selanjutnya seperti terkait penggunaan metode yang masih terbatas pada kualitatif deskriptif serta cakupannya yang baru pada satu program csr saja. Penelitian ini dapat dikembangkan kedepannya dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda untuk menangkap fenomena secara holistic dan juga dapat memberikan perspektif yang berbeda. Selain itu cakupan objek penelitian juga dapat diperluas sehingga dapat dikomparasikan antar hasil di lokasi maupun kelompok yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2017). *Survey Angkatan Kerja di Indonesia 2017*.
<https://www.bps.go.id/publication/2017/11/30/0daa04d8d9e8e30e43a55d1a/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2017.html>
- Demartoto, A. (2007). *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: UNS Press.
- Drost, J. (1993). *Menjadi Pribadi Dewasa dan Mandiri: Beberapa Pemikiran tentang Pembentukan Generasi Muda*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI)
- Handayani, N.E.W. (2019). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Keterampilan Handicraft Oleh Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang*. Skripsi: Uin Walisongo Semarang
- Hikmat, H. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Jakimow, T. (2018). Negotiating Impossibilities in Community-driven Development in Indonesia. *Journal of Developing Societies* 34(1), 35-55. <https://doi.org/10.1177/0169796X17753001>
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis : a methods sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukmina, A. (2013). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Menjahit di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susetiawan. (2012). *Corporate Social responsibility: Komitmen untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Azzagrafika.
- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., Bahagijo, S. (2012). *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Putra, A. A. S., Wisadirana, D., & Mochtar, H. (2016). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Lebah Madu Kelompok Tani Tahura (KTT)(Studi Kasus di Desa Dilem Kecamatan Gondang Mojokerto). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 19(1). 36-45

- Sholehah, I. (2017). Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach: Studi Kasus di Dusun Piring Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Oleh Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(1), 157-176.
- Solihin, I. (2015). *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suparjan, & Suyatno, H. (2003). *Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suyatna, Hempri, Sutomo dan Eka Zuni Lusi Astuti. (2015). *Pembangunan masyarakat : sebuah analisis komparatif*. Yogyakarta: Azzagrafika.
- Sutatminingsih, R. (2002). *Pengaruh Terapi Realitas Secara Kelompok terhadap Peningkatan Konsep Diri Pada Penyandang Disabilitas Fisik Usia Dewasa Awal*. Tesis S2. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Diakses pada tanggal 23 Maret 2013 melalui <http://repository.usu.ac.id/jbitsreamll23456789/7152/1/d0300258.pdf>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Usman, S. (2006). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Warsilah, H. (2015). Pembangunan inklusif sebagai upaya mereduksi eksklusi sosial perkotaan: Kasus kelompok marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 17(2).
- Wijayanto, H. (2015). Pemberdayaan Difabel dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(2), 43-67. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i2.271>
- Wibisono. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Surabaya: Media Grapika.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen pemberdayaan: Sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.